



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DOMIRI
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 84088

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.495.000.000**

1. Tanah Seluas 165 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/125 m2 di KAB / KOTA TEGAL, Rp. 405.000.000
3. Tanah Seluas 284 m2 di KAB / KOTA TEGAL, Rp. 95.000.000
4. Tanah Seluas 1.234 m2 di KAB / KOTA TEGAL, Rp. 380.000.000
5. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 255.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
5. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 61.200.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.500.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.311.700.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.311.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.